



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Strategik Tahun 2013-2018

Rencana Strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada BPBD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kebencanaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang mencanangkan Misi “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdayasaing;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintah Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Berdasarkan penjabaran sasaran dari kelima misi tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Misi Kesatu yakni



Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdayasaing.

Adapun kedudukan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung keberhasilan Misi Kesatu adalah melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial.
- c. Mengurangi resiko bencana.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.1.1. Visi dan Misi

Penguatan kedudukan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penetapan Visi, Misi dan Strategi sebagai berikut :

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian , Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka panjang. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013, telah dirumuskan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

” Terciptanya penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan profesional”.

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, setiap orang/individu dan ikut bertanggung jawab



dalam penanggulangan bencana untuk keamanan dan keselamatan dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman dalam penanggulangan bencana, upaya kesiapsiagaan merupakan faktor utama dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya strategi melalui perencanaan yang dilakukan secara terintegrasi lintas pelaku dan pemangku kepentingan.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat, sehingga perencanaan tersebut dapat berjalan lancar dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung Visi Provinsi Jawa Barat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Visi, sebagai berikut :

“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat pada tahun 2013 - 2018”.

Untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana.**
- 2. Meningkatkan Kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikatornya

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bersifat idelistik, mengandung nilai-nilai luhur dan



keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik dan berhasil. Tujuan tersebut akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang berdasarkan pada berbagai kriteria, aksestabilitas, fleksibilitas, motivasi dan mudah dipahami. Perumusan tujuan dilakukan melalui proses :

2. Peninjauan data lingkungan internal dan eksternal.
3. Memadukan umpan balik Customer dan Stake Holder.
4. Menganalisis kesenjangan pelayanan untuk mencari masalah.
5. Menentukan arah untuk mencapai keberhasilan yng diinginkan.
6. Memilih dan menetapkan tujuan.

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, maka telah ditetapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana, dijabarkan sebagai berikut ;

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;
2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;
3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buper stock dan peralatan sarana prasarana;
4. Tersedianya system informasi dan dokumentasi berbasis bencana;
5. Terwujudnya data kebutuhan insfrastruktur dan lahan rehab dan rekon pasca bencana.

Sedangkan Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Agar sasaran dapat lebih efektif, maka harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil



dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun, atau berlaku pada masa yang akan datang.

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu tahunan, sementara atau bahkan triwulan dan bulanan, perlu dirumuskan secara konkrit dan teratur. Adapun Sasaran yang da Indikator sasaran adalah meningkatkan ketahanan masyarakat agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi serta pengurangan resiko bencana (mitigasi).

2.1.3. Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran

Sebagai konkritisasi dari RPJM strategi yang dijelaskan tersebut diatas, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Stake Holder dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



VISI	MISI
<p>Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat pada tahun 2013 - 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan mengacu kepada kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan, disusunlah program-program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu, yang dilaksanakan oleh segenap aparat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk kerjasama dengan Stake holder dan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4. Kebijakan dan Program

Sebagai konkritisasi dari program-program yang telah dicanangkan, maka penetapan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tindakan nyata dalam jangka satu tahun atau kurang, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan



dan program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- b. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani Penanggulangan Bencana. Untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kebijakan tersebut perlu direalisasikan secara bertahap baik bagi petugas yang sudah ada yang secara potensial dapat ditingkatkan maupun mengisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari luar yang memenuhi persyaratan. Hal ini cukup penting mengingat di dalam proses manajemen, unsur manusia merupakan faktor yang dominan dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Mengembangkan sistem penanggulangan Bencana secara terpadu dan konsepsional. Berbagai forum koordinasi yang selama ini dilaksanakan masih perlu lebih diefektifkan lagi, dan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Koordinasi dalam upaya penanggulangan bencana harus tetap dikembangkan dari yang bersifat sektoral menjadi lintas sektoral dan regional. Untuk itu perlu ada komitmen yang kuat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD terkait, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Mengembangkan metoda Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan aplikatif. Kompleksitasnya masalah Penanggulangan Bencana menuntut aparat untuk mampu menanganinya secara sistematis, analitis dan tuntas. Untuk itu pengembangan model-model atau metode-metode yang praktis dan mudah dilaksanakan harus menjadi agenda tersendiri di dalam meningkatkan kinerja Badan



Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat teknis maupun yang bersifat manjerial.

- e. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah Penanggulangan Bencana. Dalam era globalisasi, kemajuan IPTEK dalam menangani suatu masalah merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Bagi aparat yang menangani penanggulangan bencana, baik terhadap Pemerintah Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota harus peka dan mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk memudahkan dan mempercepat upaya penanggulangan bencana, yang dari waktu ke waktu tidak semakin ringan nemun semakin kompleks, baik sebagai pengaruh dari dalam negeri maupun pengaruh dunia internasional, apabila aparat mengabaikan IPTEK, maka akan sulit untuk mensejajarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bidang-bidang lainnya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam masyarakat modern peranan Pemerintah semakin kecil, dibandingkan dengan peranan masyarakat karena pemerintah lebih bersifat fasilitator, regulator dan inovator. Menghadapi kenyataan yang ada, menunjukan bahwa penanganan masalah bencana sebagai obyek sekaligus harus berperan sebagai pelaku atau subyek. Kebijakan ini ditempuh karena keterbatasan sumberdaya yang ada pada Pemerintah, menuntut peranaktif masyarakat. Oleh karena itu melalui kebijakan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendorong dan mengkoordinasikan masyarakat agar mereka mamperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatasi masalahnya sendiri secara mandiri.



- g. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagai penjabaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terkait, setiap tahun perlu disusun program tahunan. Hal ini masih diperlukan, karena dari rencana kegiatan yang telah disusun dalam Renstra masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga perlu ada skala prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan upaya penanggulangan bencana, maka diperlukan sinergisme kegiatan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SKPD terkait dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Program Kegiatan dan Anggaran

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa BaratAlokasi Anggaran sebesar Rp. 528.600.000,-;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat, anggaran Rp. 1.088.765.000-;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 5.542.600.000,-;
- d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.577.250.000,-;



- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 164.150.000,-;
Kegiatan Pengelolaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,-
- f. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat :
 - (1) Kegiatan perkuatan bidang kebencanaan di Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.706.950.000
 - (2) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kemampuan relawan dan kesiapan dan ketersediaan Kabupaten/Kota dalam penyediaan logistik, dengan alokasi anggaran Rp.174.820.000
 - (3) Penguatan kelembagaan pusdalops BPBD Jawa Barat , dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000
 - (4) Peningkatan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistic di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.1.116.954.000
 - (5) Penguatan logistic dan Alat Evakuasi di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.2.226.450.000
 - (6) Pemantauan dan Evaluasi penanganan pasca Bencana di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 568.070.000
 - (7) Penguatan kapasitas kesiapsiagaan , dengan alokasi anggaran Rp.866.600.000
 - (8) Pengembangan forum kebencanaan , dengan alokasi anggaran Rp.290.945.000
 - (9) Peningkatan kemampuan relawan penanggulangan bencana kab/kota, dengan alokasi anggaran Rp.892.500.000,-

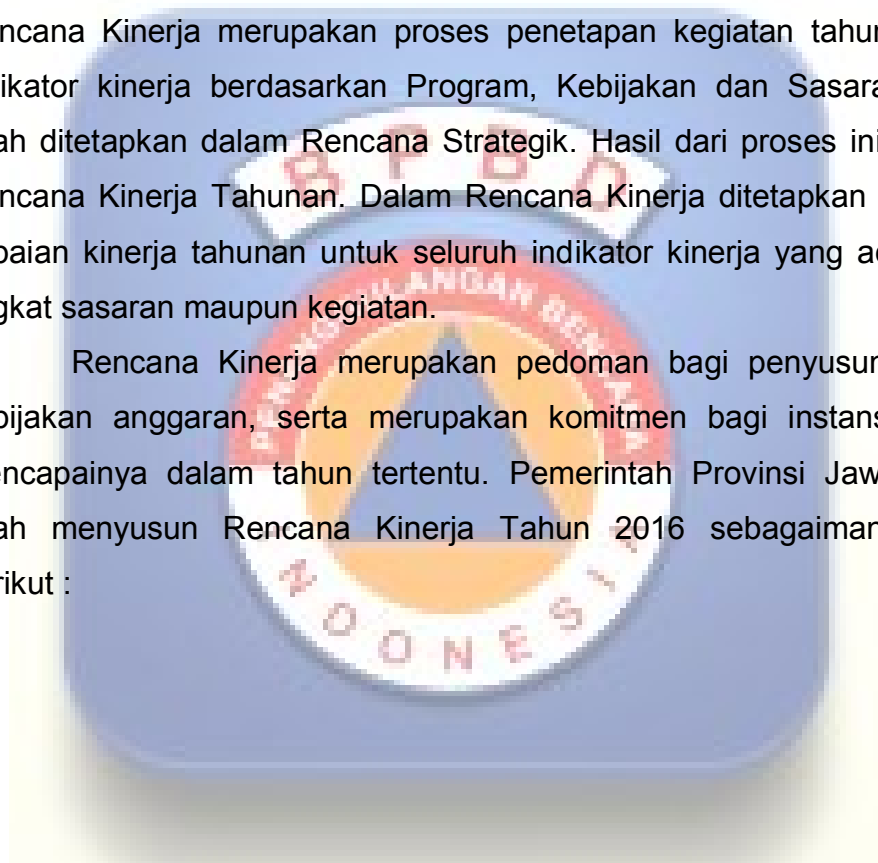


- (10)Pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat tangguh bencana, dengan alokasi anggaran Rp.540.000.000,-
- (11)Pelatihan pemulihan sarana pasca bencana, dengan alokasi anggaran Rp.680.180.000,-
- (12)Penyusunan regulasi bidang kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.186.250.000,-

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :





Tabel 2.2
RENCANA KINERJA BPBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	
			TARGET	REALISASI
MISI KELIMA : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI				
SASARAN 1 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)				
1.	Jumlah PMKS yang ditangani (Masyarakat Korban Bencana)	Orang	1% dr jmlh pddk jabar	464.971,75

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016., sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 528.600.000,- ;realisasi anggaran sebesar, Rp. 342.281.000 (64.75 %) dan realisasi fisik sebesar (100 %)



2. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.765.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 907.458.180,- atau 83.35 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.
3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.542.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.848.015.400,- atau 69.43 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, melalui Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 612.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.956.600,- atau 76.79 %.
5. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**, melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.485.972.400,- atau 94.21 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, melalui kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intern BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.150.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.305.000,- atau 99,49% dan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan Pengelolaan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar 95.074.000 atau 95,07 dan realisasi fisik sebesar 100%.
7. **Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat**, melalui kegiatan :



- (1) Perkuatan Bidang Kebencanaan di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.706.950.000, dengan realisasi sebesar Rp.702.481.038 atau 99,37%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Relawan dan Kesiapandan Ketersediaan Kabupaten/Kota dalam penyediaan Logistik dan.., dengan alokasi anggaran Rp.174.820.000, dengan realisasi sebesar Rp. 164.630.000 atau 94,17%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.578.730.000,- atau sebesar 96,46%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Kedaruratan dan Logistik di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.116.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp.920.942..000,- atau sebesar 82,45%, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100%.
- (5) Kegiatan Penguatan Logistik dan Alat Evakuasi di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.2.226.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.940.225.000,- atau sebesar 87,14 %, realaisasi fisik 100%.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencanadi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.568.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp.415.790.000,- atau 73,19 %, begitu pula realaisasi fisik sebesar 100 %.
- (7) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesiap Siagaan, dengan alokasi anggaran Rp.866.800.000, dengan realisasi sebesar Rp.860.924.000,- Atau sebesar 99,35%, begitu pula realisasi fisik sebesar 100%.



- (8) Kegiatan Pengembangan Forum Kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.290.945.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.285.600.000,- atau 98,16%. Adapun realisasi fisik kegiatan ini adalah 100 %.
- (9) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Relawan Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran Rp. 892.500.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.843.955.500,- atau sebesar 94,56%. Adapun capaian fisik sudah mencapai 100%.
- (10)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menuju Masyarakat Tangguh -Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.540.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.539.595.000,- atau sebesar 99,93 %. Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- (11)Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sarana Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.660.180.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 649.452.500.- atau sebesar 96,38 %. Adapun target capaian fisik kegiatan ini yaitu 100%.
- (12)Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan, dengan alokasi anggaran Rp.186.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.255.000,- atau sebesar 95,71% dengan capaian fisik sebesar 100%.
- (13)Kegiatan Penyusunan Kajian dan Mitigasi PRB Geo Park Ciletuh dengan alokasi anggaran Rp.437.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.431.718.000,- atau sebesar 98,67.% dengan capaian fisik 100 %.
- (14)Kegiatan Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran Rp.380.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.319.195.000,- atau sebesar 83,89% dengan capaian fisik sebesar 100%.

TABEL 2.3

**PERJANJIAN KINERJA BPBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya, aparaturnya dan Masyarakat Sadar Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah orang yang terlatih	Orang	576
2.	Masyarakat Korban Bencana di Jawa Barat	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar hidup minimal di 27 Kab/Kota	%	1 % dari Jumlah Penduduk Jawa Barat